

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2017-2021

Fice Handayani¹⁾, Widya Ahilun²

^{1,2)} Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan

^{1,2)} ficehandayani80@gmail.com , widyaahilun0@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the financial performance of the Balikpapan City Government in 2017-2021 in terms of regional financial ratios, namely the Level of Dependence, the Level of Independence, the Level of Effectiveness, the Level of Efficiency, and the Degree of Decentralization. The research method used in this study is a descriptive research method with a quantitative approach. The results of this study show that during 2017-2021 the average financial performance of the Balikpapan City Government as measured using the Dependency Level is said to be "Very High" with an average percentage of dependency level of 70,34%, measured using the level of independence is said to be "low" with an average percentage of the level of independence that is 38.64%, measured using the Level of Effectiveness is said to be "Very Effective" with an average percentage of the effectiveness level of 110.87%, measured using the Efficiency Level is said to be "Inefficient" with an average percentage of efficiency level of 299.44%, measured using the Degree of Decentralization it is said to be "Enough" with an average percentage of the degree of decentralization of 28.00%.

Keywords: Local Government Financial Performance, Dependency Level, Independence Level, Effectiveness Level, Efficiency Level, Degree of Decentralization

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Kota Balikpapan tahun 2017-2021 yang di tinjau dari rasio keuangan daerah yaitu Tingkat Ketergantungan, Tingkat Kemandirian, Tingkat Efektivitas, Tingkat Efisiensi, dan Derajat Desentralisasi. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa selama tahun 2017-2021 rata-rata kinerja keuangan Pemerintah Kota Balikpapan yang di ukur menggunakan Tingkat Ketergantungan dikatakan "Sangat Tinggi" dengan rata-rata persentase tingkat ketergantungan yaitu 70,34%, di ukur menggunakan Tingkat Kemandirian dikatakan "Rendah" dengan rata-rata persentase tingkat kemandirian yaitu 38,64%, di ukur menggunakan Tingkat Efektivitas dikatakan "Sangat Efektif" dengan rata-rata persentase tingkat efektivitas yaitu 110,87%, di ukur menggunakan Tingkat Efisiensi dikatakan "Tidak Efisien" dengan rata-rata persentase tingkat efisiensi yaitu 299,44%, di ukur menggunakan Derajat

Desentralisasi dikatakan “Cukup” dengan rata-rata persentase derajat desentralisasi yaitu 28,00%.

Kata Kunci: *Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Tingkat Ketergantungan, Tingkat Kemandirian, Tingkat Efektivitas, Tingkat Efisiensi, Derajat Desentralisasi.*

Pendahuluan

Pemerintah daerah diberikan hak otonomi daerah yang dimana bertujuan untuk memberikan wewenang terhadap daerah atas pengelolaan keuangan secara mandiri agar daerah tersebut dapat mengelola keuangan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh daerah itu sendiri sehingga pengelolaannya menjadi lebih tepat sasaran, efektif dan efisien. Adapun tujuan dari adanya pemberian otonomi daerah dan desentralisasi fiskal menurut UU No. 32 Tahun 2005 yaitu untuk meningkatkan kemandirian serta mengurangi ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat

Dari pemberian kewenangan, pemerintah daerah dituntut pertanggungjawabannya dalam bentuk akuntabilitas sektor publik. Di dalam pemerintahan juga terdapat adanya beberapa pelayanan public yang membutuhkan anggaran dalam pelaksanaannya, sehingga dibutuhkan adanya pemberian otonomi daerah. Hal ini adalah wujud dari pemberian kewenangan yang lebih luas untuk penyelenggaraan keuangan negara dari pemerintah pusat ke pemerintah Kabupaten/Kota (Hakim,2018).

Namun dengan adanya pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya sendiri tidak menjamin adanya peningkatan kemandirian dan pengurangan tingkat

ketergantungan fiskal pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Sebab ada beberapa hal-hal yang membuat tingginya tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat seperti pemerintah kota Balikpapan yang sumber pendapatan daerahnya hanya berasal dari pajak hotel dan restoran yang tidak sebanding dengan jumlah pengeluaran pemerintah daerah.

Pendapatan asli daerah merupakan kemampuan dari pemerintah daerah yang telah diberi kewenangan dalam mengurus pembiayaan daerahnya sendiri. Kemudian terdapat pengeluaran daerah yang dimana pengelolaan tersebut harus diselenggarakan dengan akuntabel dan lebih transparan agar terdapat keefektifan serta keefisienan terhadap pengeluaran daerah.

Kinerja keuangan daerah merupakan tingkat dari pencapaian suatu hasil kerja pada bidang keuangan daerah dalam memenuhi kebutuhan suatu daerah yang telah diberi otonom oleh pemerintah pusat. Tingkat keberhasilan dari sebuah kinerja keuangan dapat dilihat dari laporan keuangan yang telah disajikan, namun perlu diadakannya sebuah pengukuran terkait kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut. Pengukuran kinerja keuangan pemerintah merupakan bagian dari pengukuran kinerja keuangan sektor publik yang merupakan sebuah sistem yang bertujuan untuk membantu

manajer publik menilai pencapaian suatu strategi memulai alat ukur finansial dan nonfinansial (Mardiasmo, 2018:151).

Kajian Literatur

1. Kinerja Keuangan

Menurut (Sudaryo, 2017: 9), kinerja keuangan pemerintah daerah adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja dimasa lalu dengan melakukan berbagai analisis keuangan sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut.

Menurut (Putra, 2018: 50), kinerja keuangan pemerintah daerah adalah salah satu bentuk penilaian dengan asas manfaat dan efisiensi dalam penggunaan anggaran keuangan.

2. Tingkat Ketergantungan

Menurut (Putra, 2018: 62), tingkat ketergantungan daerah yaitu dimana jika semakin tinggi nilai persentase rasio ini, maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat atau pemerintah provinsi.

Menurut (Bisma, 2010: 78), rasio ketergantungan adalah ukuran kemampuan daerah dalam membiayai aktivitas pembangunan daerah melalui optimalisasi PAD, yang diukur dengan rasio antara PAD dengan total APBD tanpa subsidi (Dana Perimbangan).

Menurut (Mahmudi, 2010: 142), rumus dari rasio ketergantungan sebagai berikut:

$$\text{Ratio Ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

3. Tingkat Kemandirian

Menurut (Putra, 2018: 61), tingkat kemandirian adalah jika semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah mengandung rasio bahwa tingkat

ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya.

Menurut (Ulum MD, 2012: 31), rasio kemandirian yaitu menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahannya, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Menurut (Mahmudi, 2010: 142), rumus dari rasio kemandirian sebagai berikut:

$$\text{Ratio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat} + \text{Transfer Provinsi}} \times 100\%$$

4. Tingkat Efektivitas

Menurut (Putra, 2018:63), rasio efektivitas adalah jika semakin besar anggaran realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan target dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka akan semakin efektif sebuah kinerja keuangan pemerintah, dan begitu pula sebaliknya.

Menurut (Ulum MD, 2012:31), menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas maka semakin baik kinerja pemerintah daerah. Adapun rumus daripada perhitungan rasio tingkat efektivitas, yaitu:

$$\text{Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

5. Tingkat Efisiensi

Menurut (Putra, 2018:63), tingkat efisiensi adalah jika semakin besar suatu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam tingkat efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka kinerja dari pemerintah

daerah tersebut semakin baik begitupun sebaliknya, jika tingkat efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin meningkat atau besar, maka kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut semakin besar pula.

Menurut (Ulum MD, 2012:32), tingkat efisiensi yaitu rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Berikut rumus perhitungan tingkat efisiensi:

$$\text{Efisiensi PAD} = \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

6. Derajat Desentralisasi

Menurut (Mahmudi, 2016:169), derajat desentralisasi merupakan perhitungan yang berdasarkan pada perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah.

Menurut (Putra, 2018:62), tingkat derajat desentralisasi yaitu hasil dari perhitungan persentase rasio yang didasarkan pada perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total dari penerimaan daerah. Berikut adalah rumus dari perhitungan tingkat derajat desentralisasi:

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Penerimaan Daerah}} \times 100\%$$

Metode Penelitian

1. Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan menggunakan metode penelitian deskriptif.

2. Populasi dan Sampel

Populasi dari penelitian ini berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pemerintah kota Balikpapan. Dengan sampel dari penelitian ini yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah

Kota Balikpapan Tahun 2017-2021 (5 tahun).

3. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan analisis rasio keuangan daerah berupa analisis rasio tingkat ketergantungan, analisis rasio tingkat kemandirian, analisis rasio tingkat efektivitas, analisis rasio tingkat efisiensi, dan analisis rasio derajat desentralisasi.

Hasil dan Pembahasan

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2017-2021 dapat dijelaskan secara mendetail melalui deskripsi variabel penelitian dibawah:

1. Tingkat Ketergantungan

Tabel 1

Tingkat Ketergantungan Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2017-2021

Tahun	Pend. Transfer (Rp)	Total Pendapatan (Rp)	Rasio Ketergantungan	Keterangan
2017	1.367.134.459.52	1.938.309.743.312	70,53%	Sangat Tinggi
2018	1.546.332.853.277	2.227.832.853.277	69,40%	Sangat Tinggi
2019	1.835.602.843.218	2.527.027.291.918	72,63%	Sangat Tinggi
2020	1.534.125.698.889	2.084.616.352.502	73,59%	Sangat Tinggi
2021	1.466.654.901.924	2.222.150.032.524	66,00%	Sangat Tinggi
Rata-rata			70,43%	Sangat Tinggi

Sumber : Data diolah sendiri

Pada tabel 1 di atas, dapat diketahui bahwa rasio tingkat ketergantungan pemerintah kota Balikpapan pada tahun 2017-2021 mengalami fluktuasi. Dimana pada tahun 2017 tingkat ketergantungan pemerintah kota Balikpapan sebesar 70,53%, kemudian turun menjadi 69,40% di tahun 2018. Di tahun selanjutnya yaitu tahun 2019 persentase rasio

ketergantungan meningkat sebesar 72,63% dan kembali meningkat pada tahun 2020 sebesar 73,59%, kemudian di tahun 2021 persentase rasio ketergantungan menurun menjadi 66,00%.

2. Tingkat Kemandirian

Tabel 2
Tingkat Kemandirian Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2017-2021

Tahun	PAD (Rp)	Transfer Pusat (Rp)	Transfer Provinsi (Rp)	Rasio Kemandirian	Keterangan
2017	568.575.283.786	1.080.333.340.526	286.801.119.000	42,14%	Rendah
2018	678.500.000.000	1.222.821.157.277	323.511.696.000	36,76%	Rendah
2019	688.424.448.700	1.357.064.389.353	478.538.453.865	37,50%	Rendah
2020	471.519.353.613	1.193.137.671.889	340.988.027.000	30,73%	Rendah
2021	675.712.743.600	1.069.214.711.924	397.445.190.000	46,07%	Rendah
Rata-rata				38,64%	Rendah

Sumber : Data diolah sendiri

Pada table 2 diatas, dapat diketahui bahwa pesentase rasio kemandirian pemerintah kota Balikpapan selama tahun 2017-2021 mengalami fluktuasi. Dimana pada tahun 2017 tingkat kemandirian pemerintah kota Balikpapan sebesar 42,14%. Kemudian menurun ditahun 2018 yaitu sebesar 37,76% dan meningkat menjadi 37,50% pada tahun 2019 tetapi kembali menurun di tahun 2020 yaitu sebesar 30,73%. Kemudian persentase rasio kemandirian kembali meningkat pada tahun 2021 yaitu sebesar 46,07%.

3. Tingkat Efektivitas

Tabel 3
Tingkat Efektivitas Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2017-2021

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	PAD yang Dianggarkan (Rp)	Rasio Efektivitas	Keterangan
2017	612.250.040.990	568.575.283.786	107,68%	Sangat Efektif
2018	646.868.407.485	678.500.000.000	95,33%	Cukup Efektif
2019	764.087.241.241	688.424.448.700	110,99%	Sangat Efektif
2020	609.057.640.903	471.519.353.613	129,16%	Sangat Efektif
2021	755.062.500.914	675.712.743.600	111,17%	Sangat Efektif
Rata-rata			110,87%	Sangat Efektif

Sumber : Data diolah sendiri

Dapat dilihat pada tabel 3 diatas bahwa persentase pada tahun 2017 yaitu sebesar 107,68% tetapi mengalami penurunan tingkat efektivitas pada tahun berikutnya yaitu pada tahun 2018 yaitu 95,33%. Kemudian kembali meningkat pada tahun 2019 menjadi 110,99% dan untuk tahun 2020 meningkat kembali menjadi 129,16% serta pada tahun 2021 menurun menjadi 111,17% tetapi hal tersebut masih dalam batas efisien sebab persentasenya >100%.

4. Tingkat Efisiensi

Tabel 4
Tingkat Efisiensi Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2017-2021

Tahun	Biaya untuk Memungut PAD (Rp)	Realisasi Penerimaan PAD (Rp)	Rasio Efisiensi	Keterangan
2017	1.462.537.630.165	568.575.283.786	257,22%	Tidak Efisien
2018	1.653.090.013.488	678.500.000.000	243,63%	Tidak Efisien
2019	1.943.252.515.152	688.424.448.700	282,34%	Tidak Efisien
2020	1.808.667.655.006	471.519.353.613	383,58%	Tidak Efisien
2021	2.063.978.928.761	675.712.743.600	305,45%	Tidak Efisien
Rata-rata			294,4%	Tidak Efisien

	4%	Efisien
--	----	---------

Sumber : Data diolah sendiri

Pada tabel 4 tersebut dapat di liat pada tahun 2017 persentase rasio efisiensi yaitu sebesar 257,22% yang kemudian menurun menjadi 243,63% pada tahun 2018, tetapi kembali meningkat pada tahun 2019 dan 2020 yaitu 282,34% dan 383,58% dan turun kembali pada tahun 2021 yaitu sebesar 305,45%.

5. Derajat Desentralisasi

Tabel 5
Derajat Desentralisasi Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2017-2021

Tahun	PAD (Rp)	Total Penerimaan PAD (Rp)	Derajat Desentralisasi	Keterangan
2017	568.575.283.786	1.938.309.743.312	29,33 %	Cukup
2018	678.500.000.000	2.227.832.853.277	30,45 %	Sedang
2019	688.424.448.700	2.527.027.291.918	27,24 %	Cukup
2020	471.519.353.613	2.084.616.352.502	22,61 %	Cukup
2021	675.712.743.600	2.222.150.032.524	30,40 %	Sedang
Rata-rata			28,00 %	Cukup

Sumber : Data diolah sendiri

Pada tabel 5 diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 persentase derajat desentralisasi pemerintah kota Balikpapan yaitu sebesar 29,33% kemudian meningkat menjadi 30,45% pada tahun 2018, lalu pada 2 (dua) tahun setelahnya mengalami penurunan yaitu menjadi 27,24% dan 22,61%, tetapi meningkat kembali pada tahun 2021 sebesar 30,40%.

Simpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Kinerja keuangan pemerintah Kota Balikpapan dilihat dari tingkat ketergantungan daerah adalah sangat tinggi sebab persentase ketergantungannya >50%. Kinerja keuangan pemerintah Kota Balikpapan

dilihat dari tingkat kemandiriannya adalah rendah sebab memiliki persentase tingkat kemandirian <50%. Kinerja keuangan pemerintah Kota Balikpapan dilihat dari tingkat efektivitas adalah sangat efektif karena persentase tingkat efektivitasnya >100%. Kinerja keuangan pemerintah Kota Balikpapan dilihat dari tingkat efisiensi adalah tidak efisien sebab persentase tingkat efisiensi >100%. Kinerja keuangan pemerintah Kota Balikpapan dilihat dari derajat desentralisasi adalah cukup sebab memiliki persentase pada kisaran 20,01%-30,00%.

2. Saran

Pemerintah Kota Balikpapan sebaiknya mengurangi tingkat ketergantungan finansial kepada pemerintah pusat atau provinsi agar dapat meningkatkan kemandirian daerah serta pemerintah dapat lebih efisien dalam penggunaan biaya daerah.

Daftar Rujukan

Afiyah, Nunuy Nur. (2010). **Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah**. Kencana: Jakarta

Amin, N. (2015). **Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Tingkat Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kabupaten Bengkalis**. *Iqtishaduna*, 80-91. <https://ejournal.stiesyariahbengkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/64>

Amins, Achmad. (2009). **Manajemen Kinerja Pemerintah Daerah**. Samarinda

Bangga, W. (2017). **Administrasi Keuangan Negara dan Daerah**. Bogor: Ghalia Indonesia.

- Bisma, I Dewa Gde & Susanto, Hery. (2010). Jurnal Ganec Swara Edisi Khusus Vol. 4 No. 3. **Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-3007.**
- Drs. Danang Sunyoto, S. S. (2016). **Metodologi Penelitian Akuntansi.** Bandung: PT Refika Aditama.
- Dy Ilham Satria, S. M. (2016). **Akuntansi Keuangan 1.** Aceh: Universitas Malikussaleh.
- Halim, A. (2004). **Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah.** Edisi Revisi. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Halim, A. (2007). **Akuntansi Sektor Publik. Akuntansi Keuangan Daerah.** Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A, & Abdullah, S. (2006). **Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah: (Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi).** Jurnal Akuntansi Pemerintahan, 2(1), 53-64.
- Halim, A, & Syam, M, K. (2014). **Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah.** Edisi 4. Salemba Empat. Jakarta
- Hantono. (2021). **Akuntansi Sektor Publik.** Media Sains Indonesia
- Harahap, J. P. R., & Nasution, M. D. (2019). **Analisis Kemandirian dan Efektivitas Keuangan Pada Kinerja Pemerintah Kota Medan.** *Administrasi Bisnis*, 8(1), 9–14.
- Hariyani, D. S. (2016). **Pengantar Akuntansi 1 (Teori & Praktik).** Malang: Aditya Media Publishing.
- Kariyoto. (2017). **Analisis Laporan Keuangan.** Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Kasmir, S. M. (2020). **Analisis Laporan Keuangan.** Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mahmudi. (2011). **Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.** Edisi Dua. UPP STIM YKPN. Yogyakarta
- Mahmudi. (2016). **Akuntansi Sektor Publik.** Edisi Revisi. UII PRESS. Yogyakarta
- Mahsun, M., Sulistiyowati, F., & Purwanugraha, H. A. (2015). **Akuntansi Sektor Publik.** Edisi Ketiga Cetakan Kelima. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2018). **Akuntansi Sektor Publik.** Penerbit ANDI
- Ni Kadek Sinarwati, S. (2013). **Akuntansi Keuangan 1.** Bali: Penerbit Universitas Pendidikan Ganesha.
- Peraturan Walikota 1 Tahun 2022-BPKAD
- Prof.Dr.Sugioyono. (2017). **Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.** Bandung: Alfabeta.
- Putra, Windhyu. 2018. **Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah.** Depok. Rajawali Press.
- Ramadhan, F. N. (2017). **Analisis Kemandirian, Efektivitas, dan, Pertumbuhan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Barat.** 1–15.
- Ratmono, D, & Sholihin, M. (2017). **Akuntansi Keuangan Daerah, Berbasis AkruaL.** Yogyakarta:

- UPP STIM YKPN
- Sari, I., Asaari, M., & Hidayah, I. S. N. (2021). **Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010-2019**. *Proceeding Seminar Nasional & Call For Papers, September*, 408–425.
- Siregar, A. O. D., & S, I. M. (2020). **Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah (Studi Kasus : Pemerintah Kota Depok – Jawa Barat)**. *IMAGE*, 9(1), 1–19.
- Sudaryo, Y, dkk. (2017). **Keuangan di Era Otonomi Daerah**. Ed I. ANDI.Yogyakarta
- Sujarweni, V. W. (2015). **Metodologi Penelitian Bisnis Ekonomi**. Yogyakarta: Pustakabarupress.
- Sugiyono, P. (2010). **Metopen Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D**. Bandung: ALFABETA, cv.
- Sugiyono, P. (2016). **Metopen Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif Dan R & D**. ALFABETA.
- Sundari & Suprانتiningrum. Rr. (2015). **Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus Kota Semarang Tahun 2009-2013)**. *Media Ekonomi dan Manajemen*. Vol.30 No.1
- Tambuwun, E.L, Pangemanan, S.S, dan Afandi, D. (2014). **Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Manado**. *Jurnal EMBA*. Vol.2 No.4
- Titahena, C. J. (2019). **Analisa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Daerah Dalam Mendukung Otonomisasi Daerah di Pemerintah Kota Ambon**. *SOSOQ*, 7(1), 1–12.
- Ulum MD, I. (2012). **Audit Sektor Publik**. Edisi Pertama Cetakan Kedua. Jakarta: Bumi Aksara.
- UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 320 ayat (2)
- UU No. 32 Tahun 2005
- Website: balikpapan.go.id
- Website: bpkad.balikpapan.go.id
- Wicaksono, S. W. (2019). **Akuntansi Pengantar 1 Berbasis Matematika**. Yogyakarta: AB Publisher.
- Zukhri, N. (2020). **Kinerja Keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Ditinjau Dari Derajat Kemandirian, Ketergantungan, dan Desentralisasi Fiskal** Nizwan. *Indonesian Treasury Review*, 5(2), 143–149.